



## TAJUK RENCANA...

### Menghapus Subsidi Minyak Tanah

RENCANANYA minyak tanah bersubsidi di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman akan ditarik mulai 10 November 2008. Sementara tiga daerah lainnya, Kabupaten Bantul, Gunungkidul dan Kulonprogo masih menunggu proses konversi minyak tanah ke gas elpiji selesai.

Penghapusan subsidi minyak tanah di DIY tersebut disampaikan oleh Sales Area Manager Pertamina wilayah Yogyakarta Arie Anggoro kepada wartawan di kantor Bank Indonesia (BI) Yogyakarta, Selasa (5/11) lalu.

Sebagaimana dilaporkan wartawan kami, penarikan minyak tanah bersubsidi itu, karena program konversi dari minyak tanah ke gas elpiji 3 kilogram di kedua daerah, Sleman dan Jogja, sudah selesai 80 persen, sesuai pedoman dan mekanisme penarikan minyak tanah bersubsidi.

Sementara program konversi di wilayah Bantul dan Gunungkidul sampai saat ini baru memasuki tahap pendistribusian gas elpiji 3 kg, dan wilayah Kabupaten Kulonprogo masih dalam tahap pencacahan bagi calon penerima paket perdana gas elpiji 3 kg.

Kebijakan penghapusan subsidi minyak tanah ini nantinya akan berlaku untuk semua daerah di tanah air. Sebagai proyek percontohan adalah wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), yang telah dilakukan pada bulan Mei tahun lalu. Beberapa bulan kemudian disusul sejumlah daerah di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat, serta daerah-daerah di luar Pulau Jawa. Diharapkan akhir 2009 tidak ada lagi minyak tanah bersubsidi.

Jika rencana Pertamina tersebut berjalan mulus, maka mulai tanggal 10 November mendatang, harga minyak tanah di kota dan Sleman akan mengalami kenaikan cukup signifikan. Biasanya harga minyak tanah, sesuai harga eceran tertinggi, Rp 3.300 per liter -- namun dipasaran bisa mencapai Rp 5.000 per liter -- bisa naik menjadi Rp 7.000 per liter atau lebih, tergantung harga minyak dunia. Harga minyak dunia selalu mengalami perubahan sedikitnya dua kali sebulan, setiap tanggal 1 dan tanggal 15.

Kenaikan harga minyak tanah sedikitnya Rp 2.000 per liter ini tentunya sangat membebani masyarakat pengguna minyak, terlebih bagi para pedagang dan pemilik usaha kecil dan menengah yang masih mengandalkan minyak tanah sebagai bahan bakar dari produk yang dihasilkan.

Saat ini saja, warga Bantul sudah mulai was-was. Meski di wilayah paling selatan provinsi DIY tersebut minyak bersubsidi belum dihapus, tetapi mereka sudah mengalami kesulitan untuk mendapatkan minyak tanah. Selain kirimannya tidak menentu, jumlah pasokannya juga dibatasi. Akibatnya, sejumlah pangkalan membatasi pembelian, maksimal 2 liter per orang. Hal sama juga terjadi di wilayah Gunungkidul dan Kulonprogo.

Selain itu, tidak samanya penghapusan minyak tanah bersubsidi di masing-masing daerah, terlebih dengan daerah perbatasan, justru bisa memicu keresahan di tengah masyarakat. Karena akan terjadi aksi borong, minyak langka dan harga melambung. Misalnya, konsumen minyak tanah di Sleman akan lari ke Muntilan Magelang, yang masih mendapat subsidi. Atau warga Jogja ramai-ramai akan membeli minyak tanah di Bantul, Gunungkidul atau Kulonprogo.

Meski dari pihak Pertamina Yogyakarta sendiri telah melakukan antisipasi. Diantaranya menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian (Polda DIY) untuk mencegah penyelewengan dalam distribusi minyak tanah bersubsidi dari wilayah lain. Kemudian warna minyak tanah juga dibedakan, minyak bersubsidi berwarna bening dan minyak non subsidi berwarna ungu. Namun, siapa yang berani menjamin tidak akan terjadinya penyelewengan?

Tindak penyelewengan minyak tanah tidak hanya dilakukan oleh para distributor, agen maupun pangkalan saja, namun perorangan pun tidak menutup kemungkinan untuk melakukannya. Justru penyelewengan yang dilakukan oleh perorangan akan jauh lebih banyak, dan sulit diberantas.

Karenanya kita berharap, sebelum kebijakan itu benar-benar diberlakukan, alangkah baiknya seluruh perangkat pendukungnya benar-benar sudah siap. Termasuk pasokan ke pangkalan-pangkalan tetap lancar. Sehingga tindakan negatif yang akan dilakukan oleh oknum tertentu yang ingin mencari keuntungan pribadi, seperti penimbunan minyak tanah, bisa diminimalisir. \*\*\*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005